



*Ngopi bareng
Menkumham*



*Posko Keimigrasian
di Moto GP 2022*



Pesona NTB



Kumham Riders

Lensa NTB

April 2022

ntb.kemenkumham.go.id



Kanwil Kemenkumham NTB



Salam

Kemenkumham NTB

Romi Yudianto

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nusa Tenggara Barat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua

Memasuki bulan April di tahun 2022 ini, rasanya tak ada hal yang paling layak kita lakukan selain memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Berbagai rintangan maupun peluang-peluang yang menghampiri, mengajarkan kita sebuah nilai penting atas makna ikhtiar dalam beradaptasi pada sebuah era kebiasaan baru yang tanpa terasa telah kita lalui selama dua tahun lamanya. Kini secara perlahan namun pasti, adaptasi itu telah mengantarkan kita pada sebuah pengharapan dan optimisme bahwa fase ini akan segera kita rangkum menjadi sebuah pelajaran berharga kedepannya.

Semakin membaiknya tren pengendalian pandemic COVID-19 yang ditandai dengan berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan mobilitas masyarakat adalah salah satu indikator kepuhlian tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut, kami terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk mengoptimalkan komitmen kami yaitu memberikan pelayanan prima dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada akhirnya, kami memahami bahwa ditengah upaya berbagai pihak untuk beradaptasi di masa transisi ini, keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting yang turut meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas dan berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa. Karena itu, sejalan dengan upaya kami untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tak lupa, memasuki Bulan Suci Ramadhan yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, perkenankan saya mewakili keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, mengucapkan "Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1443 H" bagi Bapak/Ibu yang menjalankan. Semoga berkah Ramadhan akan mengantarkan kita semua pada berbagai kebaikan di masa-masa yang akan datang serta dapat meningkatkan iman dan ketaqwaan kita kepada Sang Maha Kuasa.

Salam sehat
Romi Yudianto

New Contents tabloids

2



Salam Kemenkumham NTB

5



Idul Fitri 1443 H

6



New Project

16



Penghargaan

17



Kumham NTB Production

15



Posko Keimigrasian

19



Desa Sadar Hukum

Lainnya di Edisi ini

- 3. Content
- 4. Publisher

- 7. Survei IPK/IKM
- 8. Wilayah Bebas dari Korupsi
- 9. Menuju WBBM

- 10. Pesona NTB
- 12. Team Work Production
- 13. Hari Bhakti Imigrasi
- 14. Sertijab Pimti

- 18. Kumham Riders

Publisher

Photo : @kunabdillah

Gedung Utama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di siang hari yang menampilkan motif adat sasak, dengan taman di halamannya berhiasan bermacam tanaman, tampak bunga melati menghiasi salah satu sisi halaman kantor.



Selamat Datang di Lensa NTB

Lensa NTB merupakan salah satu perwujudan dari Tata Nilai PASTI yang dijunjung Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Lensa NTB, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, memberikan akses informasi kepada pembaca terkait jalannya organisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui Lensa NTB, pembaca diajak untuk melihat seluruh kegiatan, inovasi hingga capaian penghargaan yang diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat selama tiga bulan terakhir. Salam Pembaruan, akan selalu dijunjung oleh tim redaksi untuk terus berinovasi dalam menerbitkan Lensa NTB agar semakin PASTI.


Kanwil Kemenkumham NTB, JUARE!

Salam

Redaksi,
Matur Tampiasih.

About Us

 Kanwil Kemenkumham NTB
Jl. Majapahit No.44 Mataram

 (0370) 7856244

CREATORS

HEAD OFFICER

Romi Yudianto

MANAGER

Saefur Rochim

SUPERVISOR

I Gde Sandi Gunasta






PIMPINAN REDAKSI

Moh. Risky Syarif

dan

TIM REDAKSI

VISIT US

-  ntb.kemenkumham.go.id
-  @kumhamntb
-  Kemenkumham NTB
-  @KemenkumhamNtb
-  Kanwil Kemenkumham NTB



Ramadan MUBARAK

Safari Ramadan



Bulan Ramadan merupakan bulan yang menjadi momen dalam menjalin kebersamaan dan silaturahmi dengan sesama muslim. Salah satu cara mendapatkan momen tersebut yaitu dengan Safari Ramadan.

Safari Ramadan merupakan kegiatan rutin di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, kegiatan ini dimulai dari Kantor Wilayah hingga menjangkau seluruh Satuan Kerja baik Pemasyarakatan maupun Imigrasi, dari Kota Mataram hingga Kota Bima.

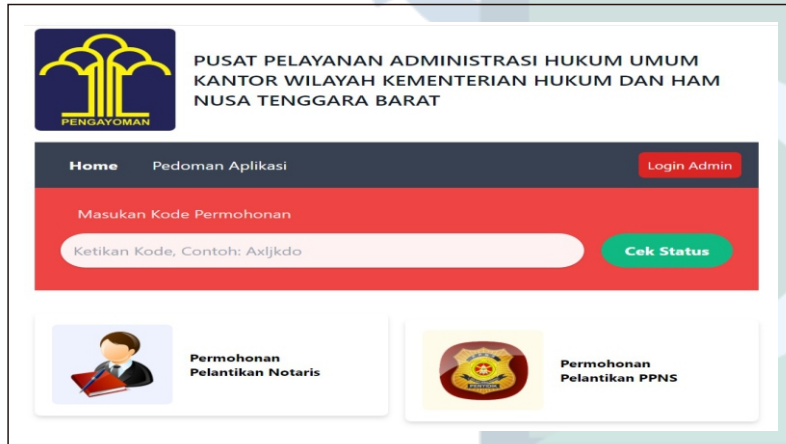
Safari Ramadan ini merupakan ajang mempererat tali silaturahmi sesama jajaran dan juga meningkatkan keimanan dengan mengundang para pemuka agama untuk memberikan tausiah.



عيدنا هنيئاً مبارك في شهر رمضان 1443 هـ



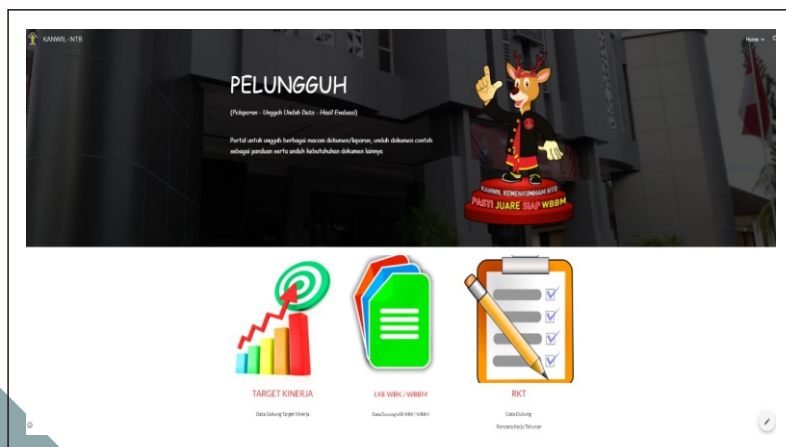
PROJECTS



SiHumoris merupakan pusat pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, yang dikemas dalam sebuah sistem aplikasi berbasis web. Aplikasi ini merupakan sebuah inovasi dari Kanwil Kemenkumham NTB untuk memudahkan pengguna layanan AHU khususnya di Nusa Tenggara Barat dalam mengurus dokumen terkait layanan AHU.



Aplikasi Manajemen Program Kegiatan dan Anggaran atau disingkat **AMPENAN**, merupakan inovasi berbasis web digunakan untuk memantau pelaksanaan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.



Pelungguh merupakan inovasi berupa portal yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengunggah berbagai macam dokumen/laporan, unduh dokumen contoh sebagai panduan serta unduh kebutuhan dokumen lainnya.

Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
NUSA TENGGARA BARAT

PASTI WBK
SIAP MENUJU WBBM
KAMI SIAP MELAYANI

☎ 081818244 @kumhamntb Kanwil Kemenkumham NTB



SELAMAT DATANG

MEMASUKI WILAYAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT



Selamat datang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Anda memasuki kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Kalimat ini akan anda lihat dan dengar ketika memasuki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Kantor Wilayah telah banyak melakukan perubahan menuju kearah yang lebih baik, baik dari segi tampilan maupun pelayanan yang bersih dan bebas dari praktek KKN. Hal ini terbukti pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB).

Berhasilnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan semangat pimpinan yang berhasil ditularkan kepada seluruh jajaran sehingga terbentuknya kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak untuk mewujudkannya.

Komitmen membangun zona integritas merupakan langkah awal dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Hal ini diimplementasikan dengan melakukan pencaanangan zona integritas dan penandatanganan komitmen bersama sleuruh pegawai pada awal tahun serta menunjukan hal tersebut kepada instansi-instansi terkait serta media untuk dapat mempubli-kasikan ke masyarakat luas dan memberitahu semua pihak bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa tenggara Barat mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Nantinya diharapkan masyarakat dan media menjadi pengawas dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan dampak positifnya terhadap masyarakat.

Selain komitmen, ada lagi hal penting yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yaitu pelayanan publik prima yang bebas dari praktek pungli dan KKN. Ini menjadi point penting dalam meraih WBK dan WBBM, karena merupakan faktor hasil yang harus diwujudkan oleh setiap instansi ketika ingin meraih predikat WBK dan WBBM.



Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Mewujudkan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah merupakan sebuah keharusan dan tuntutan pada zaman modern ini atau yang saat ini disebut Era Revolusi Industri 4.0. Era ini juga merupakan era keterbukaan informasi publik, dimana setiap masyarakat dapat mengakses segala informasi yang bernilai positif dengan mudah dan cepat.

Optimalisasi penggunaan layanan berbasis IT adalah satu yang tidak boleh terlewatkan. Pemerintahan saat ini sudah harus dapat menyesuaikan dengan system yang terus berkembang. Terlebih lagi Indonesia saat ini diisi oleh banyak anak muda yang haus akan informasi. Anak muda saat ini sudah sangat melek dan mengikuti perkembangan teknologi, dan itu harus dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Era Revolusi Industri 4.0 dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu system dan langkah pemerintah untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya korupsi. Melalui pencanangan komitmen zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, merupakan strategi pemerintah dalam menumbuh kembangkan kepercayaan public terhadap pemerintah.

Ada 2 point penting untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani : Pertama, komitmen adalah janji pada diri sendiri dan pihak lain untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai yang dibebankan pada seorang pimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Kedua, inovasi pada pelayanan publik yang harus dikembangkan secara berkesinambungan dan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi pegawai dan masyarakat secara luas sehingga juga dapat menekan terjadinya praktek pungutan liar dan KKN.



Mendukung hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2018 telah melakukan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2019, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari delapan belas Kantor Wilayah yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK. Pada penutup tahun 2020 melalui seluruh tahapan penilaian, Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat berhasil meraih predikat WBK yang diberikan KemenPAN & RB.

Untuk tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat menargetkan untuk dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini diwujudkan dengan membangun semangat dan kerjasama mulai dari pimpinan hingga jajaran kebawah pada tingkat pegawai honorer. Semua jajaran bersemangat dalam mendukung mewujudkan WBBM pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat.



Lensa NTB

Menikmati kesegaran udara di Lombok tidak harus dengan mendaki Gunung Rinjani. Pulau Lombok menyimpan surga kecil di kaki Gunung Rinjani. Surga tersebut ialah Desa Sembalun di Kabupaten Lombok Timur. Bukit-bukit Sembalun menjadi destinasi wisata untuk menghirup kesegaran dan kesejukan udara Gunung Rinjani.

  Kun Abdillah



Team WORK

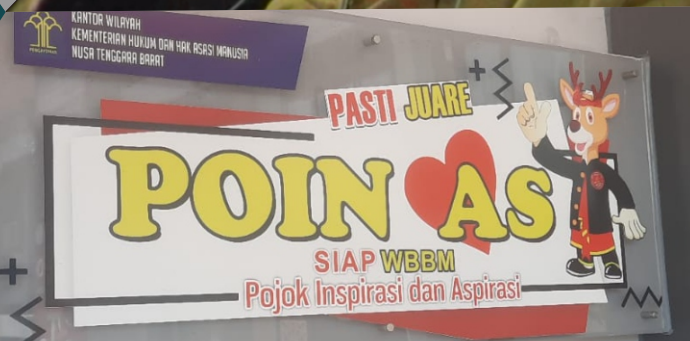
POIN AS COFFEE CORNER PODCAST

Poin AS

Poin AS (Pojok Inspirasi dan Aspirasi) merupakan wadah komunikasi langsung antara pimpinan dengan seluruh Team Work

Coffee Corner

untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan, kami memberikan fasilitas self service berupa coffee corner



"NGOPI" Ngobrolin Inspirasi & Aspirasi

"Orang yang Berhasil adalah yang Mampu Mengatasi Rangkaian Tantangan ataupun Kesulitan yang ada" - Yasonna H Laoly

program podcast yang berisi bincang-bincang bersama tokoh hebat yang mengunjungi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB. Melalui podcast ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada khalayak publik dari narasumber hebat dan sebagai wadah aspirasi untuk kemajuan pemberian layanan.

Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

 **KEMENKUMHAM NTB**
BY TEAMWORK KUMHAM NTB

Hari Bhakti Imigrasi Ke 72

Upacara dan Syukuran Peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-72 Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengusung tema “Bangkitnya Pelayanan, Revitalisasi Penegakan Hukum dan Kemanaan Untuk Negeri”. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB bersama Inspektur Wilayah II dan jajaran Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti upacara secara virtual. Hadir pula para Kepala Divisi, Pejabat Struktural Kanwil Kemenkumham NTB dan Satker se Pulau Lombok.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Yasonna H. Laoly mengamanatkan jajaran Imigrasi harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai “PASTI”. Di usia 72 tahun ini, tidak boleh lagi salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Jajaran Imigrasi harus disiplin dan taat azas, melayani masyarakat dengan lebih baik, bekerja tanpa pamrih, optimal, dan bersemangat.

“Usia 72 tahun mencerminkan tingkat kematangan baik dalam organismaupun dalam hal berkinerja. Segala pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian harus benar-benar kita lakukan dengan Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)”, tutur Yasonna.



Kumham NTB Berbagi

Sebagai wujud syukur dan pengabdian kepada masyarakat, Kanwil Kemenkumham NTB mengadakan pengajian rutin mingguan bersama anak yatim. Kegiatan pengajian yang digelar setiap hari Rabu dikhususkan untuk anak-anak panti asuhan, secara bergiliran panti-panti asuhan di sekitar kantor akan diundang dalam kegiatan ini.

Kegiatan dimulai dengan pembacaan surah Yasin, dilanjutkan dengan tahlil, dzikir dan doa serta pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan.

Serah Terima Jabatan Kakanwil



Pergantian Pimpinan merupakan salah satu proses dinamika pembinaan organisasi agar tercipta penyegaran dan munculnya ide-ide yang lebih kreatif dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Begitu pula pergantian pucuk pimpinan di Kanwil Kemenkumham NTB. Haris Sukanto, Kepala Kantor Wilayah yang sudah 1 tahun 6 bulan mengabdikan diri di Kanwil Kemenkumham NTB resmi digantikan oleh Romi Yudianto pada Maret 2022. Romi Yudianto bukan sosok yang asing di Kemenkumham. Sebelumnya, Romi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Satuan Kerja binaan Kanwil Kemenkumham NTB. Setelahnya, Romi sempat menjadi pimpinan di beberapa Kantor Imigrasi yang mempunyai peran yang cukup vital sebagai pintu masuk dan pintu keluar Negara Republik Indonesia. Kantor Imigrasi yang pernah dipimpin Romi yaitu, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Dengan pergantian pimpinan ini, Kanwil Kemenkumham NTB diharapkan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk membangun Nusa Tenggara Barat.



Posko Keimigrasian



Posko Informasi Keimigrasian di KEK Mandalika

Perhelatan MotoGP Mandalika menarik wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Antusiasme wisatawan mancanegara dalam menghadiri event besar ini, diantisipasi oleh pihak Keimigrasian NTB dengan membangun dua Posko Imigrasi. Posko 1 Imigrasi dibangun di dekat Pantai Kuta Mandalika, sedangkan Posko 2 dibangun di dalam area Sirkuit Mandalika. Kedua Posko Imigrasi ini didirikan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai produk dan prosedur keimigrasian kepada masyarakat terutama untuk wisatawan mancanegara.

Imigrasi juga mengerahkan seluruh jajarannya dari Kanim Mataram, Kanim Sumbawa Besar dan Kanim Bima di dua posko tersebut untuk selalu siaga dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Di samping itu, mobil patroli keimigrasian disiagakan disana untuk mempermudah mobilitas petugas. Kedua Posko Imigrasi ini juga mendapatkan kunjungan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Haris. Apresiasi diberikan Menteri Yasonna untuk kedua posko imigrasi tersebut. Ia berharap Pos ini mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Diharapkan juga kedepannya, posko imigrasi ini dapat terus berjalan karena Kuta merupakan salah satu spot yang banyak didatangi warga asing untuk berlibur.

Immigration Patrol



Satuan Kerja Terbaik Tanpa Penolakan SPM



Kanwil Kemenkumham NTB menerima penghargaan Satuan Kerja (Satker) Terbaik Tanpa Penolakan SPM dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Percepatan Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2022 dan Pemberian Piagam Penghargaan atas Pengelolaan Keuangan Terbaik Tahun 2021 pada Rabu (06/04). Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim dari DJPb Provinsi NTB. Selain Kanwil Kemenkumham NTB, satker binaan Kanwil juga mendapatkan penghargaan dari DJPb Provinsi NTB. Penghargaan ini tidak lepas dari pembinaan yang berjalan dengan baik dari Kantor Wilayah kepada seluruh satker binaannya.

Rutan Bima mendapat peringkat pertama Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi TA 2021 kategori Satker Sedang. Kemudian, Lembaga Lapas Selong mendapat peringkat kedua sebagai Satker Pengguna Digital Payment (Digipay) Marketplace terbaik TA 2021 di Provinsi NTB. Tak ketinggalan Rupbasan Sumbawa Besar berhasil mendapat peringkat pertama Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi TA 2021 Kategori Satker Kecil. Dalam Rakorda ini juga dibahas kinerja belanja Kementerian maupun Lembaga di lingkup Provinsi NTB serta reformulasi IKPA TA 2022 yang mana terdapat perubahan dalam aspek maupun indikator kinerja.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ayo Sampaikan...

PERTANYAAN, ASPIRASI, KRITIK & PENGADUAN ANDA MELALUI



LAMAN
www.lapor.go.id

UNTUK LAYANAN PUBLIK
YANG LEBIH BAIK



SMS PENGADUAN
1708
Kumham (spasi) Aduan

MOBILE APPS:





Film Pendek tentang kegagalan penyelundupan manusia. Film ini diperankan sendiri oleh TeamWork Kanwil Kemenkumham NTB. Film "The Smuggler" ini dimaksudkan dalam rangka untuk menyambut Hari Bhakti Imigrasi ke-72

Film ini telah dirilis bersamaan saat peringatan Hari Bhakti Imigrasi pada tanggal 27 Januari 2022

[Film Penyuluhan Hukum] **BULLYING**

Kata ibuku, bullying adalah seorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dengan sengaja menyakiti atau menakut-nakuti orang yang lebih lemah. Tindakan ini terkadang terulang-ulang dan cenderung sering dilakukan, seperti teman2 ku.

Saksikan video selengkapnya di chanel youtube kami



TUTORIAL SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR YANKOMAS KUMHAM NTB

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) merupakan salah satu layanan Kanwil KEMENKUMHAM NTB bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk pengaduan permasalahan HAM, untuk kemudahan pelaporan atau pengaduan masyarakat dapat mengunjungi situs : simasham.kemenkumham.go.id





KUMHAM MSATA PUSUK SEMBALIN



Selain sebagai penyaluran hobi riding dan menikmati alam, pembentukan club motor dengan nama Kumham Riders ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi antara seluruh jajaran. Anggota Kumham Riders ini tidak hanya pegawai Kanwil saja, melainkan juga seluruh pegawai di Satuan Kerja di pulau Lombok dan Sumbawa.



Kumham Riders

Club motor ramah dari jajaran pegawai Kanwil Kemenkumham NTB



Menkumham Kukuhkan 64 Desa Sadar Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, mengukuhkan 64 Desa/Kelurahan Binaan Menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (21/03/2022) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) NTB.

Dalam sambutannya, Kakanwil Haris Sukamto, menyatakan terima kasihnya terhadap jajaran Forkopimda atas kolaborasi dan sinergitas yang telah dibangun selama ini sehingga Kanwil Kemenkumham NTB dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kesadaran hukum.

Pernyataan Haris ini juga didukung oleh pernyataan dari Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, yang juga berterima kasih atas kedatangan Yasonna untuk mengukuhkan desa binaan sadar hukum ini. "Saya harap NTB menjadi provinsi yang mampu berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Selama ini, kami berterima kasih dan berharap kunjungan Bapak Menteri bukan yang terakhir tapi juga mengukuhkan banyak hal-hal penting di bidang hukum," kata Bang Zul, sapaan akrabnya.

Menkumham Yasonna mengatakan tingginya kesadaran hukum juga menjadi modal dasar nasional bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. "Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi," ungkap Menteri kelahiran Sumatera Utara ini.

Pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sendiri merupakan wujud nyata sinergi dari Kemenkumham dengan Pemerintah baik dalam lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB. "Ini adalah wujud konkrit dari sinergi Kemenkumham dengan pemerintah daerah di NTB baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota," jelasnya.

Tidak hanya mengukuhkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum, Yasonna juga menyaksikan langsung penandatanganan dokumen hibah oleh Gubernur NTB untuk Kemenkumham yang dalam hal ini menghibahkan lahan dan bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, yaitu Rupbasan Mataram.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gubernur karena telah bersedia menghibahkan sebagian lahan dan bangunan yang nantinya dipergunakan sebagai tempat untuk UPT Pemasarakatan. Tentunya ini akan sangat mendukung dan bermanfaat dalam memaksimalkan kegiatan pemasarakatan utamanya dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara," tutup Yasonna.

Lensa *NTB*

